



Heri Mukti Ogah Beri Keterangan ✓

■ Dinas Cipta Karya Adakan 696 Paket Pengadaan Langsung ■ Jalur Lambat Subrantas Terkendala

PEKANBARU, TRIBUN - Jajaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya Pekanbaru, hingga Kamis (2/10) siang belum menjawab konfirmasi Tribun mengenai pemecahan paket pekerjaan di lokasi yang sama menjadi paket pekerjaan dengan sistem pengadaan langsung dengan nilai di bawah Rp 200 juta. Sekretaris dinas tersebut, Heri Mukti, tidak menjawab upaya konfirmasi Tribun.

Diberitakan sebelumnya, dinas tersebut memecah paket pekerjaan dengan total nilai Rp 83 miliar lebih itu menjadi 696 paket pekerjaan dengan sistem pengadaan langsung. Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Riau, Triono Hadi sebelumnya menyatakan dengan pemecahan paket pekerjaan itu, terbuka peluang lebar untuk praktek korupsi. Sementara itu, terkait pekerjaan di jajaran dinas pekerjaan umum, pengerjaan jalur lambat sepanjang 600 meter di Jalan HR Subrantas Panam, kini menemui kendala.

Pengerjaan yang sedang dilakukan Dinas Bina Marga Pekanbaru tersebut tertunda,

hanya gara-gara karena belum selesainya ganti rugi lahan warga oleh pemerintah, yang terkena pembuatan jalur lambat.

Namun kepastian ganti rugi tersebut masih diteliti suri Dinas Bina Marga lagi. Pasalnya, hampir sepanjang Jalan HR Subrantas Panam, kelebihan tanah dari as jalan (DMJ) sudah milik pemerintah. Terkesan aneh, jika masih ada lahan warga yang belum diganti rugi.

Terlepas dari persoalan itu, kalangan dewan mengharapkan, agar masyarakat ikut mendorong program pemerintah ini. Sehingga pengerjaan pembangunan jalur lambat tersebut, bisa selesai cepat. Dengan begitu, kemacetan di jalur tersebut, bisa berkurang dan teratasi.

Anggota DPRD Pekanbaru Herwan Nasri, Kamis (2/10) mengatakan, jika memang masih ada persoalan ganti rugi lahan, bisa diselesaikan dengan baik. Yang pasti, jangan hanya persoalan itu, pengerjaan ditunda dalam waktu yang lama.

"Intinya, masyarakat juga diminta mendukung sepenuhnya. Tidak perlu



TRIBUN/SYAFRUDDIN

JALUR LAMBAT - Satu unit alat berat parkir di lokasi pengerjaan jalur lambat di JL HR Subrantas, Kamis (2/10). Pengerjaan jalur lambat belakangan mulai terkendala.

mempermasalahkan berlarut-larut, karena dipastikan ada jalan keluarnya. Sebab, jalur lambat ini keuntungannya untuk masyarakat juga," kata Herwan Nasri, Kamis (2/10) menjawab Tribun.

Seperti diletahui, pembangunan jalur lambat sepanjang 600 meter tersebut menggunakan dana APBD Pekanbaru 2014. Nilai pembangunannya Rp 3 miliar lebih. Sesuai target tahun ini harus

selesai pembangunannya.

Pengerjaan jalur lambat jilid dua HR Subrantas Panam ini, merupakan lanjutan dari pembangunan jalur lambat yang sudah dibangun tahun 2013 lalu, dari simpang Jalan Putri Tujuh hingga Purwodadi. Panjangnya sama, yakni 600 meter juga.

Pemerintah (Pemko Pekanbaru) berencana membuat jalur lambat ini hingga ke Simpang Panam. Angga-

rannya diambil dari APBD Pekanbaru. Jalur lambat ini sengaja dibuat, selain mengatasi kemacetan, juga untuk memperindah tata kota.

Sehingga masyarakat pengguna jalan, merasa nyaman dan tidak khawatir terjadinya kecelakaan. Lebih lanjut disebutkan politisi Golkar ini, untuk pembebasan lahan yang kini menjadi persoalan, diharapkan bisa selesai secepatnya. (brt/saf)